

# KORAN DAERAH DI BAWAH BAYANG PENGUASA DAN PENGUSAHA

## Kasus Kebijakan Kemitraan dalam Penerbitan Lombok Post

Lalu Gita Ariadi

### ABSTRACT

*This study is aimed at understanding policy process at the local level, particularly with regards to the effectiveness of policy on kemitraan (lit. privatization), the potential advantages that would be obtained by the public as well as the private sector. Privatisation in local governance has a bright future for both sectors as it is also in line with current policy on regional autonomy. The findings of this research show that kemitraan policy has been run effectively at the local level and it could give social, political and economic advantages to the local government, the businessmen and the community at large. The government does not have to intervene in much of the societal life and the private sector can accommodate the government interest without spoiling each other.*

**Key Word :** *political reform, local autonomy, privatization*

### PENDAHULUAN

Peran dan keberadaan industri media massa sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media massa merupakan alat kontrol dalam masyarakat dan merupakan forum yang semakin berperan menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat.

Selain itu, media massa seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan symbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. Media massa telah menjadi sumber

dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media massa menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (Dennis Mc Quail, 1987).

Pada tahapan tertentu industri media massa merupakan obyek persaingan memperebutkan kontrol dan akses, tidak terlepas dari percaturan politik, ekonomi dan hukum serta industri media massa sering kali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya dalam melaksanakan pembentukan publik opini, persuasi dan sebagainya. Dalam proses perkembangan selanjutnya industri media massa tumbuh menjadi pilar

masyarakat modern, menjadi industri dalam masyarakat kapitalis serta menjadi alat perjuangan mewujudkan gagasan negara demokrasi modern.

Lancarnya arus informasi memungkinkan masyarakat mengetahui dengan pasti setiap dinamika pembangunan yang sedang terjadi sehingga dapat menentukan sikap yang tepat untuk berpartisipasi didalamnya. Informasi akurat media massa akan dapat mendorong pemerintah untuk selalu menyempurnakan berbagai kebijakannya. Dengan demikian media massa bukan hanya sebagai alat mengekspresikan pendapat dan ide, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk interaksi masyarakat sekaligus alat kontrol dan pembentukan opini yang ampuh untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Dalam kehidupan yang semakin mengglobal yang kian diwarnai derasnya arus informasi akibat semakin canggihnya teknologi komunikasi, penyebaran berita (informasi) secara cepat ketangan khalayak merupakan sebuah keniscayaan. Penyebaran berita secara cepat dan akurat dapat dicapai bila tersedia media yang secara profesional mampu mencari dan mengumpulkan berita-berita, untuk kemudian dikemas dalam bentuk informasi bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta sangat berkepentingan untuk merebut akses dan potensi besar yang terkandung dalam industri media massa sebagai alat perjuangan mewujudkan berbagai misi masing-masing. Demikian pula halnya dengan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat menyadari dan memandang betapa penting

keberadaan industri media massa di daerah sebagai alat perjuangan untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasi daerah.

Sejak tahun 1947 di Propinsi Nusa Tenggara Barat telah dirintis terbitnya koran daerah, namun usaha tersebut perkembangannya sangat lamban bahkan cenderung statis. Sampai akhir tahun 1988, hanya ada satu surat kabar mingguan yang terbit di Kota Mataram yang pengelolaannya ditangani pihak swasta. Perkembangan koran daerah inipun ternyata belum menunjukkan prospek yang menggembirakan.

Perkembangan, kondisi dan karakter industri media massa (pers) disuatu tempat akan berlain-lainan, semua itu ditentukan oleh sejarah, geografi, politik, ekonomi, agama, konfigurasi kelompok-kelompok etnik, standar pendidikan (tingkat melek huruf), ukuran atau luas wilayah serta baik tidaknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang tersedia (M. Linggar Anggoro, 2000 ). Untuk beberapa indikator tersebut Propinsi Nusa Tenggara Barat selama ini menghadapi berbagai kendala sehingga ikut memberikan implikasi buramnya potret industri media massa di daerah.

Seiring tibanya era reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan industri media massa baik dipusat maupun daerah. Hal yang paling mencolok adalah bermunculannya industri media massa dengan idealisme dan kepentingannya masing-masing. Secara nasional terjadi "booming" industri media massa hingga mencapai 200% ditandai dengan munculnya berbagai surat kabar, tabloid, majalah maupun bulletin baru dengan kandungan yang

bersifat lokalistik. Di Propinsi Nusa Tenggara Barat selain harian Lombok Post, pada periode ini muncul tidak kurang 30 media baru sebagai kompetitor.

Perkembangan kehidupan industri media massa pada era reformasi dengan kondisi yang terjadi ketika rezim Orde Baru berkuasa sangatlah berbeda. Dari perspektif ekonomi, selama Orde Baru berkuasa seleksi pasar telah memunculkan kecenderungan ke arah konsentrasi penguasaan pasar baik pasar pembaca ataupun pasar iklan ditangan sejumlah kecil media cetak ataupun konsentrasi kepemilikan media oleh sejumlah kelompok media. Karakteristik spesifik rezim Orde Baru serta perkembangan kapitalisme di era Orde Baru tersebut secara langsung mempengaruhi perkembangan struktur industri media massa ditanah air.

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, industri media massa baik dipusat maupun di daerah mengalami perubahan struktural yang sangat signifikan sebagai akibat dari tuntutan reformasi. Perubahan tersebut diawali dengan deregulasi industri media massa yang dilakukan oleh Menteri Penerangan Yunus Jusfiah dibawah Kabinet BJ. Habibie antara lain pencabutan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/ 1984 tentang ketentuan SIUPP yang dijadikan dasar pembredelan sejumlah media.

Sebagai gantinya, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 132 tahun 1998 yang memberi kemudahan memperoleh SIUPP. Pada masa Orde Baru untuk mendapatkan SIUPP paling cepat sekitar satu tahun dan dana sekitar Rp. 250 Juta (Media Indonesia, 7 Juni 1998). Selain itu, bila

di era Orde Baru pengajuan permohonan SIUPP memerlukan rekomendasi PWI maka kini hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Pewadahan tunggalan jurnalis kedalam PWI juga dihapus melalui pencabutan surat Keputusan Nomor 47/Kep/Menpen/1975 mengenai pengukuhan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia, (Dedy Nur Hidayat, 2000 ).

Gejala menjamurnya industri media massa di era reformasi, bila dikaitkan dengan Teori Normatif sebagaimana dikemukakan Mc Quail (1987), corak industri media massa cenderung mempraktekkan "Teori Media Demokratik Partisipan" yang condong pada keserbaragaman, segmentatif dan lokalistik. Akan tetapi dari sedemikian banyak industri media massa nasional dan daerah yang muncul pada era reformasi, ternyata yang mampu bertahan tidak lebih dari 25 %, selebihnya banyak yang terbit secara tidak teratur atau terbit hanya edisi perdana/perkenalan lalu menghilang dari peredaran. Khusus industri media massa daerah yang tidak mampu bertahan lama tersebut kembali dihadapkan pada berbagai persoalan klasik sehingga kalah bersaing dengan media massa daerah yang telah mapan.

Beberapa kendala yang menghambat berkembangnya industri media massa di Propinsi Nusa Tenggara Barat selama ini meliputi : Keterbatasan sumber daya manusia lokal yang memiliki kemampuan mengelola Industri media massa daerah, keterbatasan sumber dan materi berita yang mampu disajikan, keterbatasan perusahaan yang umumnya bermodal kecil dengan

struktur perusahaan yang lemah, tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah yang belum kondusif, belum berkembangnya kegiatan perdagangan dan perindustrian di daerah sehingga kegiatan periklanan yang merupakan salah satu sumber kehidupan Industri Media Massa belum mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri media massa di daerah, daya beli dan minat baca masyarakat di daerah yang masih rendah, kekalahan bersaing dengan koran nasional yang menyerbu daerah dan sebagainya.

Dengan kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, mekanisme pasar belum mampu atau gagal bekerja secara sempurna (*market failures*). Implikasinya, minat pengusaha pers nasional atau para investor untuk menanamkan modalnya dalam industri media massa di Propinsi Nusa Tenggara Barat menjadi rendah.

Disisi lain meskipun pemerintah daerah memiliki penerbitan berupa buletin-buletin yang diterbitkan oleh jajaran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), namun peran dan keberadaan penerbitan pemerintah tersebut belum mampu memenuhi harapan dan selera pasar. Untuk terjun langsung secara professional mengelola sebuah penerbitan umum, pemerintahpun menghadapi kendala seperti : keterbatasan sumber dana (APBD) untuk menggerakkan Industri Media Massa, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola hal-hal yang bersifat redaksional maupun manajemen perusahaan serta hambatan struktural tidak diperkenalkannya pemerintah menangani langsung industri media massa.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki pihak swasta maupun pemerintah daerah, mendorong mereka menangani industri media massa daerah ini bersama-sama melalui sebuah pola kemitraan. Terlepas dari motivasi politik pemerintah dan motivasi bisnis pihak swasta, argumentasi dan idealisme yang mendukung perlunya kebijakan kemitraan ini adalah agar di daerah tersedia media komunikasi yang mampu menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, edukatif dan persuasif sesuai kebutuhan daerah, mampu menyerap aspirasi rakyat di daerah sekaligus mampu menggugah semangat dan motivasi masyarakat berpartisipasi mendukung pembangunan di daerah.

Kebijakan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk bermitra usaha dalam industri media massa merupakan sebuah fenomena menarik mengingat kedua aktor (pemerintah dan swasta) jelas-jelas memiliki motivasi dan orientasi yang berbeda. Hanazaki (1998) menyebutkan dua tujuan utama kepemilikan industri media massa di Indonesia yaitu mengejar keuntungan dan memupuk kekuatan. Perbedaan orientasi pemerintah dan swasta secara jelas dapat disimak pada kehidupan media massa di era Orde Baru dimana pemerintah sesungguhnya tidak terlalu suka jika industri media massa dapat berkembang menjadi besar dan kuat. Pembatasan terhadap jumlah halaman dan volume iklan (35 % dari ruang), system perizinan yang cenderung dipersulit dan sikap menghalangi penggunaan teknologi baru untuk industri media massa seperti cetak jarak jauh, merupakan alat pemerintah

menghalangi industri media massa agar tidak tumbuh membesar sehingga sulit dikendalikan.

Tulisan ini akan mencoba melihat keuntungan yang mampu diraih, efektifitas dan masa depan kebijakan kemitraan ini mengingat implementasinya berlangsung dalam dua iklim politik berbeda yang tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri bagi kinerja implementasi kebijakan. Disatu sisi tibanya era reformasi membawa konsekuensi berupa tuntutan kehidupan industri media massa yang bebas yang tidak lagi tergantung atau diintervensi oleh kekuatan-kekuatan diluar kepentingan media massa. Di era reformasi, pemerintah diharapkan tidak lagi campur tangan dengan melakukan kontrol terhadap kehidupan pers dan perkembangan industri media massa sebagaimana yang selama ini dipraktekkan oleh rezim Orde Baru. Dalam era kemerdekaan pers sekarang ini para pengelola industri media massa menyadari bahwa mekanisme pasar akan sangat menentukan hidup matinya sebuah industri media massa.

Disisi lain, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) dan mempertahankan bahkan meningkatkan efektifitas sumber pendapatan lama (intensifikasi) sesuai dengan batas kewenangan yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999 maupun UU nomor 25 tahun 1999.

Dengan demikian, meskipun secara sosial politis pemerintah tidak lagi dapat terlibat secara intens dalam mengontrol kehidupan pers akan tetapi dari perspektif ekonomi terlebih di era

otonomi daerah kemitraan ini dinilai menguntungkan pemerintah daerah karena mendatangkan profit berupa deviden atas saham yang dimiliki. Kontribusi ekonomi yang positif ini mengharuskan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempertahankan pola kemitraan yang telah ada. Akankah perbedaan kepentingan ini masih mampu diakomodasi dalam sebuah format kemitraan ?

## FORMAT KEMITRAAN

Secara teoritis kebijakan kemitraan dilakukan karena pemerintah maupun swasta menghadapi kendala dan keterbatasan dalam memenuhi barang dan jasa kebutuhan publik, sementara barang dan jasa tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat. Robinson (1989) menyebutkan bahwa proses kemitraan merupakan buah usaha dari pihak-pihak yang bermitra dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki komitmen yang sama. Prinsip dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu dimana pihak-pihak yang bekerjasama (*bermitra*) mempunyai kedudukan "sejajar" (*Equal Standing*). Proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip-prinsip dasarnya dipenuhi yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Dalam praktek pelaksanaan kemitraan, sering terjadi hal-hal seperti: **pertama**, pihak-pihak yang akan bermitra belum memiliki kesiapan yang sama. **Kedua**, kesejajaran dalam kedudukan antara pihak-pihak yang akan bermitra belum terjadi dan tidak

dapat terjadi secara tiba-tiba. **Ketiga**, fungsi pasar tidak berjalan. Melalui pola kemitraan pemerintah dan swasta dapat menjalankan peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan pelayanan publik.

Salah satu persoalan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi barang kebutuhan publik adalah kemampuan keuangan yang terbatas. Di tengah keterbatasan ini pemerintah daerah dituntut kreatif memanfaatkan potensi, peluang dan kesempatan yang terbuka. Menyadari arti penting kemitraan dengan pihak swasta. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat merintis berbagai upaya kemitraan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1987 yang mengatur mekanisme Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 Pasal 3, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara : Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik, sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) serta Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

Bentuk Kemitraan yang dilakukan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama ini adalah mengadakan

Kerjasama dalam pemanfaatan asset-asset (barang tidak bergerak berupa tanah) dengan pihak ketiga yang salah satunya adalah PT. Suara Nusa Media Pratama dalam rangka penerbitan Koran Lombok Post.

Berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/PER/MEN PEN/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan Mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) disebutkan bahwa penerbit pers yang dapat mengajukan permohonan mendapatkan SIUPP adalah dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

Karena pemerintah daerah tidak dapat secara langsung terlibat utuh dalam industri media massa, melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 86 Tahun 1983 tanggal 25 Februari 1993 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Yayasan Media Suara Nusa sebagaimana tertuang dalam Akta Tanggal 10 Juni 1993 Nomor 13 pada Kantor Notaris Abdurrahim SH Mataram. Yayasan Media Suara Nusa inilah yang selanjutnya menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk bermitra usaha dengan PT. Jawa Pos Group menerbitkan koran daerah yang lebih representatif.

Kerjasama ini terwadahi dalam sebuah perseroan terbatas yaitu PT. Suara Nusa Media Pratama yang selanjutnya menangani penerbitan Surat Kabar Harian (SKH) Suara Nusa. SKH Suara Nusa kemudian berganti nama menjadi Lombok Post sesuai Surat Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 30 September 1998 Nomor 149/Ditjen PPG/K /1998 perihal Perubahan Nama dan Pengasuh

SKH Suara Nusa. Adapun komposisi kepemilikan saham awal terdiri dari : Pemerintah Propinsi NTB Cq. Yayasan Media Suara Nusa sebesar Rp. 200 Juta (30,8%), PT. Jawa Pos Rp. 290 Juta (44,6%), Sugeng Wijaya Rp. 30 Juta (4,6%) dan Ismail Husni (Yayasan Karyawan) sebesar Rp.130 Juta (20%).

Meski dalam kemitraan ini Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saham awal senilai Rp. 200.000.000 (200 lembar saham @ Rp. 1.000.000,-), Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat tidaklah menyerahkan dana segar berupa uang tunai namun dalam bentuk penyerahan asset daerah berupa sebidang tanah seluas 18 are dan bangunan di atasnya di Kota Cakranegara yang kini dijadikan Kantor Lombok Post serta kompensasi atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan usaha Koran Lombok Post selanjutnya. Sedangkan para pemegang saham yang lainnya dalam kemitraan ini menyerahkan dana segar berupa uang tunai sebagai modal awal usaha penerbitan surat kabar Lombok Post.

Dalam proses pelaksanaan kemitraan kegiatan usaha surat kabar Lombok Pos menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini nampak dari penjualan koran maupun pemasangan iklan yang meningkat. Pada tahun 1998 misalnya, usaha penjualan surat kabar dan iklan mencapai Rp. 1.602.013.000,- dengan komposisi 63,77 % untuk penjualan koran dan 36,23 % untuk iklan. Dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan penjualan surat kabar 47,80 % dan pemasangan iklan -4,51 % sebagai

imbas terpaan badai krisis moneter. Angka pertumbuhan total 1998 mencapai 23,32 %. Selama tahun 1998, volume surat kabar yang dicetak rata-rata 6.152 eks/hari dan terjual 5.879 eks/hari. Perbandingan dengan oplah tahun 1997 terdapat pertumbuhan penjualan sebesar 22,81%.

Kegiatan produksi baik yang berkaitan dengan masalah redaksi maupun percetakan terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan. Prioritas kegiatan redaksi dititik beratkan pada peningkatan kualitas isi dan citra yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan langkah-langkah strategis seperti: melaksanakan evaluasi dan perencanaan harian/mingguan, melaksanakan diskusi terbatas dengan mengundang sumber berita, membuka rubrik baru yang dibutuhkan serta mengirim reporter mengikuiti Diklat. Dibidang percetakan tetap mempertahankan ukuran kertas Koran yang lebih kecil/*Broad Sheet Muda*.

Dalam Rapat Umum Pemegang saham ( RUPS ) Jawa Pos Group koran Lombok Post dinilai manajemennya sudah cukup sehat dan disetujui untuk membagi deviden sesuai dengan komposisi kepemilikan saham. Penilaian ini tentu sangat positif bagi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat karena awalnya tidak berpikir terlalu jauh tentang keuntungan sisi bisnisnya. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat merasakan buah manisnya kemitraan berupa pembagian deviden yang selanjutnya dijadikan sebagai kontribusi untuk meningkatkan PAD. Adapun besarnya deviden yang telah diberikan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana nampak pada tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Deviden yang Diberikan Kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Tahun	SHU	Deviden
1	1997	Rp. 50.000.000	Rp. 13.000.000
2	1998	Rp. 200.000.000	Rp. 52.300.000
3	1999	Rp. 300.000.000	Rp. 75.000.000
4	2000	Rp. 350.000.000	Rp. 90.000.000

Sumber : Pengelola Lombok Post

## EFEKTIFITAS KEMITRAAN

Secara metodologis, dalam kebijakan kemitraan pemerintah dan swasta dalam industri media massa ini efektifitas kebijakan sebagai variabel tergantung dipengaruhi oleh tiga variabel bebas yaitu komitmen pemerintah, komitmen swasta dan komitmen masyarakat. Untuk mengetahui apakah kebijakan kemitraan sudah berjalan secara efektif ataukah belum dapat dianalisa dari ketiga variabel tersebut yaitu :

### Komitmen Pemerintah.

Dalam menganalisa komitmen pemerintah ini teradapat dua indicator yang dapat dijadikan landasan yaitu apa yang menjadi motivasi pemerintah untuk melakukan kebijakan kemitraan ini serta apa dan seberapa besar kontribusi yang diberikan untuk mendukung kebijakan tersebut selanjutnya.

1. Motivasi utama pemerintah melakukan kebijakan kemitraan ini adalah agar di daerah (NTB) dapat terbit sebuah koran daerah yang representatif karena kebaradaannya tentu akan sangat positif untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam rangka penyampaian pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat di daerah, membantu

tumbuhnya kontrol atau pengawasan masyarakat sebagai pra syarat terwujudnya *good governance* di daerah dan sebagainya. Dengan motivasi seperti itu pemerintah Propinsi NTB tidak pernah bermaksud untuk menjadikan koran daerah semata-mata sebagai corong pemerintah secara berlebihan. Pemerintah Propinsi NTB memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan hidup kepada koran Lombok Post dengan cara tidak melakukan intervensi yang terlalu mendalam hingga ke permasalahan yang bersifat teknis. Pemerintah memberikan keleluasaan (*otonomi*) kepada pengelola Lombok Post terlebih dalam hal redaksional untuk memberitakan apa saja termasuk bersuara kritis terhadap kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tidak mengeksploitasi isu-isu rawan yang bernuansa SARA. Batasan untuk tidak mengeksploitasi unsur SARA tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan pers, namun semata-mata agar koran Lombok Post-pun ikut menjaga stabilitas dan suasana kondusif yang telah tercipta. Manakala iklim ini tidak dipelihara, dapat memicu terjadinya instabilitas



di daerah yang akan merugikan semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan industri media massa itu sendiri karena tidak akan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

## 2. Kontribusi Pemerintah Dalam Mendukung Kemitraan.

Sesuai dengan akte kerjasama yang telah disepakati, pemerintah Propinsi NTB menyertakan assetnya berupa tanah dan bangunan yang kini ditempati sebagai kantor Lombok Post. Selain penyertaan asset daerah tersebut pemerintahpun memberikan dukungan melalui kebijakan (*good will*) seperti program koran masuk desa, himbauan berlangganan Lombok Post kepada para pejabat dan instansi pemerintah yang kesemuanya dapat memperluas pasar dan meningkatkan produksi (*oplag*) sehingga mampu mendatangkan keuntungan bagi industri media massa daerah tersebut.

## Komitmen Swasta.

Seperti halnya pemerintah, motivasi swasta tergerak melibatkan diri dalam kebijakan kemitraan ini adalah karena adanya idealisme betapa pentingnya keberadaan sebuah koran didaerah. Idealisme ini tentu pula didorong oleh kejelian melihat peluang bisnis manakala industri media massa daerah mampu dikelola dengan baik. Bagdikian (1969) menyatakan bahwa industri media massa adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Dalam kasus industri media massa di Indonesia Hanazaki (1998) mencontohkan pengalaman Bakrie

(harian Pelita, Berita Yudha, Tabloid Gema Olahraga serta AN Teve), Oetama (Kompas) maupun Samola (Jawa Pos) yang telah membuktikan bahwa industri media massa bila mampu dikelola dengan baik bisa menjadi bisnis yang menguntungkan.

Dalam menjalankan industri media massa daerah ini pengelola Lombok Post telah berupaya menegakkan sikap profesionalismenya tanpa mengurangi sikap akomodatif dan kooperatifnya dengan pemerintah menyangkut hal-hal yang strategis dan bagi kepentingan bersama. Pengelola Lombok Post dalam proses kemitraan ini mampu memainkan peran gandanya dengan mensinergikan kepentingan bisnis dan non bisnis secara proporsional.

## Komitmen masyarakat.

Dalam industri media massa dikenal adanya ungkapan bahwa media massa dan massa adalah ibarat ikan dengan air. Tanpa perhatian terhadap air yang diperlukannya, ikan lambat laun akan menemui kematiannya. Secara psikologis dan geografis, media massa dan massa mempunyai hubungan yang sangat kuat. Keinginan dan keperluan massa sejauh mungkin harus dapat dilayani oleh industri media massa. Keterlibatan massa sebagai obyek liputan dan kemudian ditampilkan dalam media akan memperoleh arti tersendiri. Manakala hal tersebut dilakukan tidak segan-segan khalayak mengeluarkan dana. Itulah yang terjadi dalam perkaitan ekonominya (Ecip, 2000).

Hadirnya industri media massa daerah dengan menyajikan materi berita yang dekat dengan realitas

keseharian masyarakat daerah disambut secara positif oleh masyarakat di daerah. Respon positif masyarakat menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) diikuti tumbuhnya rasa bangga (*sense of pride*) atas adanya koran di daerah sehingga daerahnya tidak lagi di cap terbelakang dibanding daerah-daerah lainnya. Rasa memiliki dan rasa bangga ini mendorong tumbuhnya rasa ikut bertanggung-jawab (*sense of responsibility*) terhadap hidup matinya industri media massa daerah.

Meningkatnya jumlah oplag dan kian diterimanya koran Lombok Post meski dengan harga yang relatif bersaing dengan koran-koran nasional yang jumlah halaman, kualitas sajian dan penampilannya lebih baik, mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah ini memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk ikut mendukung berkembangnya industri media massa daerah khususnya Lombok Post.

## MASA DEPAN KEMITRAAN

Dalam pelaksanaan kemitraan penerbitan Koran Lombok Post, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan mitra usahanya telah mendapatkan keuntungan secara mutualistik. Pada tahap awal Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan keuntungan yang bersifat sosial politis namun dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat telah pula mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis seiring kian mantapnya manajemen usaha penerbitan.

Pada awal proses kemitraan penerbitan koran Lombok Post, diwarnai tarik menarik kepentingan

antar aktor yang terlibat didalamnya. Masing-masing pihak berupaya menonjolkan kepen-tingannya yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Di era kemerdekaan pers sekarang inipun secara logika antar aktor yang bermitra usaha berpeluang terjadinya konflik kepentingan karena bagaimanapun pihak swasta berorientasi pada pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya (*Profit Oriented*) dengan konsekwensi materi pemberitaan harus berorientasi pada pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh pasar yang kadangkala berseberangan dengan kepentingan pemerintah. Disisi lain Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat selaku pemilik saham tentu ingin memanfaatkan Lombok Post sebagai media untuk memupuk kekuatan yang berdimensi sosial politik antara lain seperti untuk memperkuat legitimasi atas kebijakan yang diterapkan maupun untuk tujuan pembentukan opini publik yang berpihak pada pemerintah.

Perbedaan motivasi dan orientasi ini manakala dapat disinergikan secara positif, akan memberikan keuntungan secara mutualistik. Namun sebaliknya manakala konflik kepentingan tidak dapat dikelola dengan baik akan mempengaruhi performansi dan efektifitas kemitraan yang telah terjalin. Dominasi peran swasta dalam kemitraan industri media massa akan merugikan kepentingan pemerintah. Sebaliknya, intervensi pemerintah yang terlalu jauh juga akan merugikan kepentingan mitra usaha yang berjuang keras dalam ketatnya kompetisi industri media massa.

Terjadinya perkembangan positif penerbitan Koran Lombok baik dalam

hal perkembangan usaha, perkembangan kegiatan produksi maupun perkembangan kualitas personil dan manajemen memberikan indikasi bahwa kebijakan kemitraan berjalan efektif. Semua pihak telah mendapatkan keuntungan secara mutualistik. *Pertama*, pihak Pemerintah, mendapatkan keuntungan social politis berupa tersebarnya pesan-pesan pembangunan hingga ke pelosok pedesaan dan juga mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis berupa pembagian deviden sebagai kontribusi kepada PAD.

*Kedua*, pihak Swasta, dengan pengelolaan dan manajemen usaha yang makin baik mampu mendatangkan keuntungan ekonomis (*profit*) serta mendapatkan keuntungan ideologis karena idealisme pers dapat dijalankan dengan baik tanpa intervensi berlebihan dari Pemda. *Ketiga*, Masyarakatpun akhirnya mendapatkan materi berita yang

sangat dibutuhkan berupa informasi peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi ditengah-tengah masyarakat daerah dan juga berbagai garis kebijakan yang ditempuh oleh Pemda. Masyarakat memiliki media komunikasi baik antar sesama anggota masyarakat maupun komunikasi dengan pemerintah dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapatlah dikatakan bahwa kebijakan kemitraan ini telah berjalan efektif dimana ketiga komponen yang menentukan efektifitas kebijakan kemitraan ini baik pemerintah, swasta dan masyarakat sama-sama memiliki komitmen yang positif untuk mendukung kebijakan kemitraan menerbitkan koran Lombok Post. Penilaian ini didukung tanggapan positif yang diberikan responden sehingga dalam kaitan masa depan kebijakan, responden memberi tanggapan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.

**Tabel 2. Tanggapan dan Harapan Responden Terhadap Masa Depan Kebijakan Kemitraan Penerbitan Lombok Post.**

No.	Responden	Harapan			Jumlah	Ket
		Lanjut-kan	Kaji Ulang	Hentikan		
1	Pemerintah	9	1	0	10	-
2	DPRD	5	4	1	10	-
3	Mitra Usaha	7	2	1	10	-
4	Wartawan	4	5	1	10	-
5	Pelanggan	9	1	0	10	-
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
	<b>%</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Primer hasil penelitian

**Tabel 3. Kepentingan Para Stakeholders, Harapan dan Kenyataannya Dalam Penerbitan Koran Lombok Post**

No.	Stakeholders	Kepentingan	Harapan	Kenyataan
1	<u>Media</u> a. Pengelola  b. Wartawan  c. Karyawan	a. Terbitnya koran daerah yang bermutu  b. Terselenggaranya idealisme Pers  c. Iklim kerja membaik	a. Manajemen usaha dan redaksional yang mandiri  b. Redaksional otonom  c. Perusahaan kian maju	a. Terwujud, intervensi pemerintah rendah  b. Berita diterima pembaca  c. LP berkembang baik
2	<u>Pemerintah</u> a. Pemda  b. DPRD	a. Tersedianya media komunikasi pembangunan  b. Tersedia Media Pendidikan Politik Masyarakat	a. Tersebar nya pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah  b. Media kontrol masyarakat thd Pemda dan DPRD	a. Terwujud melalui Program KMD  b. Mulai terwujud di era reformasi
3	<u>Masyarakat</u> a. Umum  b. Kampus  c. Ulama	a. Tersedia media informasi khusus daerah  b. Tersedianya media pencerdasan bangsa  c. Tersedianya media pembinaan moral masyarakat	a. Tersajinya berita daerah yang proporsional dengan harga terjangkau  b. Berita tidak membodohi masyarakat  c. Berita mencerminkan kultur dan karakter masyarakat NTB yang religius dan toleran	a. Berita kian proporsional, professional namun harga relatif mahal  b. Kualitas informasi rendah  c. Eksploitasi berita penyimpangan seks, kriminalitas dan peristiwa pertentangan SARA
4	<u>Bisnis</u> a. Pariwisata  b. Industri perdagangan-jasa	a. Berkembangnya kembali sector kepariwisataan daerah  b. Berkembangnya kegiatan usaha dan mengalirnya investor	a. Tersajinya berita yang kondusif bagi pengembangan sektor kepariwisataan dan mempromosikan potensi wisata daerah  b. Berita yang mendukung tumbuhnya iklim usaha di daerah	a. Sering eksploitasi kerusuhan sosial serta memblow up eksep pariwisata  b. Sering ekspos peristiwa gangguan sosial

## PENELITIAN

Berdasarkan data diatas nampak bahwa 34 responden (68 %) mengharapkan agar kebijakan kemitraan ini dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Responden yang menolak dilanjutkannya kebijakan kemitraan ini berjumlah 3 responden (6 %) dengan argumentasi : *pertama*, tidak relevan lagi dengan era kemerdekaan pers yang mengharuskan industri media massa bebas dari intervensi dan campur tangan pemerintah dan hanya tunduk pada bekerjanya mekanisme pasar. *Kedua*, manakala swasta telah mampu mandiri maka peran pemerintah hendaknya dikurangi dan pemerintah berperan kembali sebagai fasilitator membantu swasta lainnya yang juga ingin berkiprah.

Adapun 13 responden (26%) mengharapkan agar kebijakan kemitraan ini dikaji ulang dalam arti pemerintah dan mitra usahanya melakukan evaluasi mendalam tentang berbagai kekuatan dan kelemahan kebijakan selama ini serta bagaimana mengantisipasi peluang dimasa yang akan datang.

Secara teoritis mengaju pada pendapat Djohan (1997), langkah evaluasi atau penilaian kebijakan ini perlu dilakukan untuk menilai baik buruknya kinerja serta mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan. Manakala hasil evaluasi ternyata menunjukkan sesuatu yang positif maka mau tidak mau kebijakan tersebut harus dilanjutkan. Begitu pula sebaliknya manakala kinerja dan dampaknya negatif maka kebijakan tersebut haruslah dihentikan.

Meski telah disebutkan bahwa kebijakan kemitraan ini berjalan efektif yang didukung berbagai indikator sebagaimana terungkap dalam penelitian, namun kebijakan kemitraan ini tentulah tidak dapat dikatakan berjalan secara sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Bila kembali mengacu pada pendapat Mc-Quail, kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan media sangatlah heterogen yang sulit untuk dipenuhi secara paripurna.

Berkait dengan penerbitan Lombok Post, suka ataupun tidak suka maka kepentingan, harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan Lombok Post belum sepenuhnya memberikan dan memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkannya. Bila disimpulkan dari tanggapan para responden dengan berbagai latar belakangnya maka secara umum dapat disimak tabel 3 yang menyajikan kepentingan, harapan dan kenyataan yang dirasakan atas pemberitaan Lombok Post selama ini.

## PENUTUP

Dengan berjalannya kebijakan kemitraan secara efektif, kebijakan ini dapat dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan melakukan penyempurnaan pada berbagai kelemahan yang masih ada seperti tidak ditegaskannya secara detail batasan waktu, pembagian beban dan tanggung jawab serta hal-hal teknis lainnya.

Pola kemitraan sebagaimana diterapkan dalam kebijakan kemitraan industri media massa daerah seperti ini dapat dijadikan acuan bagi Pemda untuk menjalin kemitraan selanjutnya bersama mitra usaha yang lain dengan

tetap mempertimbangkan beberapa hal penting antara lain : *pertama*, Pemda dan swasta melakukan kerjasama patungan (*joint venture*). *Kedua*, dalam kerjasama ini tidak memberatkan beban APBD tetapi kontribusi Pemda dikonvensasi dengan peningkatan pemanfaatan asset-asset daerah serta goodwill yang dimiliki pemerintah yang harus dilakukan secara transparan. *Ketiga*, dalam kerjasama selanjutnya pemerintah bertugas mengawasi dan tidak terlibat dalam intervensi yang berlebihan (rasional dan proporsional) karena hal ini akan mematikan kultur bisnis mitra usaha. *Keempat*, dalam kerjasama selanjutnya maka beban, resiko dan keuntungan harus dinikmati secara adil lewat kesepakatan yang jelas dan tegas yang telah ditentukan sebelumnya.

Pola kemitraan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas sangat penting untuk dikembangkan sehingga kebijakan kemitraan yang dijalin pemda akan produktif dalam ikut meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan di era otonomi sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Linggar, 2000, *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya Odi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djohan, Djoehermansyah, 1997, "Pemerintah Daerah dan Pembuatan Kebijakan", *Republika*, Jumat 3 Oktober hal 6
- Dwiyanto, Agus, 1996, "Kemitraan Pemerintah - Swasta dan Relevansi Terhadap Reformasi Administrasi Negara", *JKAP*, 1 (1), Mei : 12
- Hanazaki, Yasuo, 1998, *Pers Terjebak*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta
- Hidayat, Dedy Nur, 2000, "Institusi Pers, Modal dan Demokratisasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM, The Habibie Centre*, 1 (2) : 36
- Mc-Quail, Denis, 1996, *Teori Komunikasi Massa - Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.